

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DIY UNTUK RKPD TAHUN 2021

BIDANG PEMBANGUNAN

1. Pembangunan : Peningkatan Infra struktur (Investasi di sector public)
2. Sasaran pembangunan : Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berarti penanggulangan kemiskinan.
3. kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks,bersifat multidimensional mencakup dimensi sosial, ekonomi, fisik,politik, kelembagaan, dan bersifat unik untuk setiap daerah karena tiap daerah mempunyai karakteristik yang cukup bervariasi.
4. permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah beberapa diantaranya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, tingginya angka pengangguran, sedikitnya lapangan pekerjaan, kurangnya kreatifitas, kemiskinan kultural (turunan), dan lemahnya akses atas aset-aset ekonomi.

- Esensi kemiskinan adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan.
- Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
 - (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
 - (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

- Menurut Ginanjar Kartasasmita tipologi kemiskinan di kelompokkan menjadi:

1. *Persisten Poverty* yaitu kemiskinan yang terjadi secara turun temurun

2. *Cyclical Poverty* yaitu kemiskinan yang dasar logikanya mengikuti kemiskinan struktural, dimana polanya bergantung pada siklus ekonomi

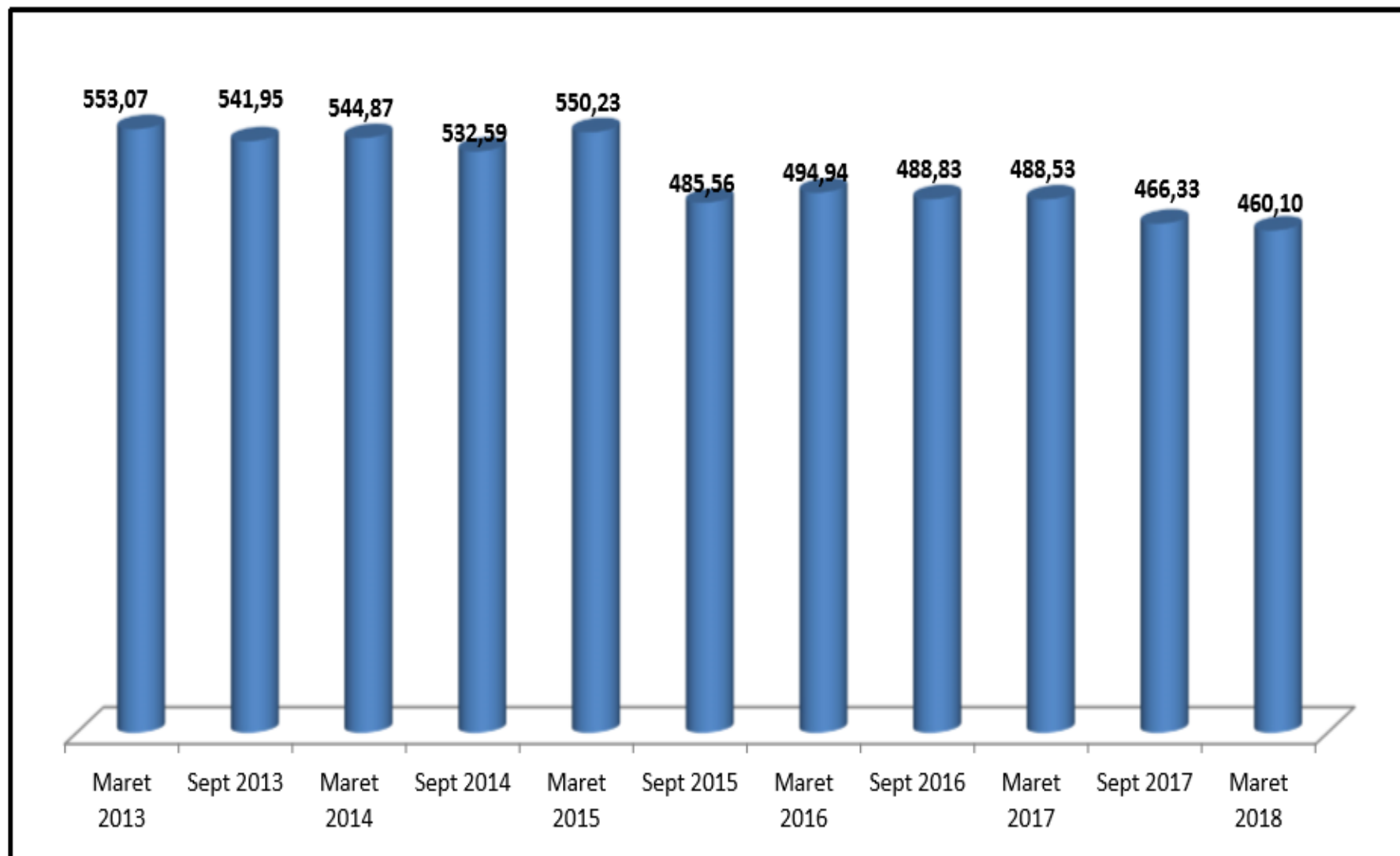
3. *Seasonal Poverty* yaitu kemiskinan musiman, biasanya dialami oleh masyarakat petani atau pesisir pantai.

4. *Accidental Poverty* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam

- Perpres 166 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan kemiskinan bukan hanya pada pemerintah pusat saja, namun memerlukan dukungan dan keikutsertaan pemerintah daerah maupun masyarakat luas dan dunia usaha.

Gambar 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta
Maret 2013 - Maret 2018 (dalam ribuan orang)



Sumber : BPS, Susenas Maret 2013 - Maret 2018

- Data-data yang telah ditampilkan di atas tentunya semakin menguatkan bahwa kemiskinan merupakan masalah prioritas yang harus segera diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah DIY dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY
- Langkah langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan :
 1. Karena kemiskinan bersifat multi- dimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain.
 2. meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (networking), serta informasi pasar
 3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.

- Korelasi infra struktur dalam penanggulangan kemiskinan :
 1. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (dengan sistem padat karya),mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
 2. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.
 3. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif, Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi sederhana yang tersedia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan dan memperluas kesempatan kerja